

**PERANAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
AEK SIJORNI**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan*



Oleh :

**Riski Hasanah
TM/NIM 2006 / 79233**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu 11 Mei 2011 Pukul 16.00 s/d 17.30 WIB

Peranan Pemerintah Tapanuli Selatan Dalam Pengelolaan Pariwisata Aek Sijorni

Nama : RISKI HASANAH
TM/NIM : 2006/79233
Program studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Mei 2011

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir MAPA, Phd	_____
Sekretaris	: Drs. Ideal Putra, M. Si	_____
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	_____
Anggota	: Drs. Syamsir, M. Si	_____
Anggota	: Heni Muchtar, SH, M.Si	_____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA

NIP: 19610720 198602 1 001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan Pemerintah Tapanuli Selatan Dalam Pengelolaan
Pariwisata Aek Sijorni
Nama : Riski Hasanah
TM/NIM : 2006/79233
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Februari 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Afriva Khaidir, MAPA. Phd
NIP. 19

Drs. Ideal Putra, M.Si
NIP. 19

ABSTRAK

RISKI HASANAH, 79233/2006 : Peranan Pemerintah Tapanuli Selatan Dalam Pengelolaan Pariwisata Aek Sijorni

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Tapanuli Selatan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari informan kunci (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Tapanuli Selatan dan Kepala Desa Aek Libung) dan informan selanjutnya (masyarakat sekitar Aek Libung dan pengunjung pariwisata Aek Sijorni). Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan teknik analisa uji keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni belum maksimal peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni baru berupa: (1). Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan prasarana dan sarana pariwisata Aek Sijorni, (2). Melakukan promosi pariwisata, (3). Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan pariwisata Aek Sijorni, (4). Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata, (5). Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata. Dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni pemerintah Tapanuli Selatan menghadapi kendala, yaitu kendala Internal dan Eksternal, Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni pemerintah Tapanuli Selatan melakukan upaya: (1). Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata (2). Melakukan promosi pariwisata, (3). Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata, (4). Melakukan Kerja Sama dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata.

Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan peranan dan perhatian pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni semakin meningkat dan bersama-sama masyarakat membangun, mengembangkan dan mengelola pariwisata Aek Sijorni.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Pemerintah Tapanuli Selatan Dalam Pengelolaan Pariwisata Aek Sijorni”** dan salawat beserta salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Pendidikan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D selaku pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama ini.
2. Bapak Drs. Ideal Putra, M. Si, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pelajaran yang berarti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Tim Penguji: Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Bapak Drs Syamsir, M.Si dan Ibu Henni Muchtar, SH, M. Hum yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi.

4. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ketua, Sekretaris, Staf pengajar serta tata Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini
6. Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Tapanuli Selatan, staf Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Tapanuli Selatan yang telah bermurah hati memberikan data dan informasi serta memberi arahan selama penelitian.
7. Orang tua penulis dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materil.
8. Bapak Kepala desa Aek Libung, masyarakat desa Aek Libung, pengunjung Aek Sijorni yang telah berkenan membantu kelancaran penulis selama penelitian.
9. Rekan-rekan BP 2006, kakak-kakak dan adik-adik se-jurusan yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini. Terima kasih atas kritikan dan sarannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis. Amin.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah..... 4

C. Fokus Penelitian..... 6

D. Tujuan Penelitian..... 6

E. Manfaat Penelitian..... 6

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis..... 8

1. Pemerintahan..... 8

a. Sistem Pemerintahan Daerah 12

b. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah..... 14

2. Pariwisata..... 18

a. Sapta Pesona Pariwisata.....	19
b. Prasarana dan Sarana Pariwisata.....	25
c. Keamanan dan Kenyamanan Pariwisata.....	27
d. Promosi Pariwisata.....	29
3. Peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pariwisata.....	31
4. Kendala-kendala dalam pengelolaan pariwisata.....	36
5. Upaya-upaya dalam pengelolaan pariwisata.....	38
B. Kerangka Konseptual.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	43
D. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	44
E. Uji Keabsahan Data.....	47
F. Teknik Analisa data.....	48

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	50
B. Temuan Khusus.....	61
C. Pembahasan.....	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar nama-nama informan penelitian.....	43
Tabel 4.2 Mata Pencarian Penduduk desa Aek Libung.....	52
Tabel 4.4 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke pariwisata Aek Sijorni	52
Tabel 4.5 Sasaran dan indikator kantor Pariwisata dan Kebudayaan Tapanuli Selatan.....	61
Tabel 4.6 Pembangunan dan perbaikan sarana di pariwisata Aek Sijorni.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual.....	41
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata bukanlah sesuatu hal bersifat baru, dimana kegiatan ini sudah dikenal sejak dulunya, akan tetapi kegiatannya dilakukan secara sederhana, pariwisata dulunya lebih populer disebut dengan istilah “bertamasya“ seiring dengan perkembangan tingkat kehidupan manusia dibidang sosial ekonomi, sosial budaya, serta teknologi maka bentuk kegiatan pariwisata menjadi suatu kegiatan yang lebih luas (makro).

Kegiatan pariwisata tersebut didorong oleh suatu keinginan untuk melihat keindahan alam pada suatu daerah atau wilayah, keindahan alam merupakan suatu karunia Tuhan yang sangat berharga dalam kehidupan manusia untuk itu perlu dimanfaatkan secara baik dan tepat sehingga secara langsung tanpa disadari akan mempengaruhi kehidupan masyarakat menuju sejahtera, sebaliknya jika tidak dimanfaatkan dengan baik sudah barang tentu mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat. Hal demikian dijelaskan oleh Samsuridjal (1997:9) tidak semua negara atau daerah memiliki keindahan alam sehingga bagi negara atau daerah yang memiliki keindahan alam yang bagus sehingga bagi Negara atau daerah yang memiliki keindahan alam mempesona diberdayakan secara baik dan tepat.

Dalam pengelolaan pariwisata dan memanfaatkan keindahan alam yang ada dalam pengelolaannya harus memperhatikan dan mengimbangi antara

pemanfaatan dan keseimbangan lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan apalagi menyebabkan kerusakan ekosistem. Pemahaman akan pembangunan berwawasan lingkungan sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu tempat pariwisata, karena dengan pemahaman tersebut diharapkan akan dapat menjaga kelestarian alam dan tidak hanya mengambil keuntungan dari alam akan tetapi berusaha juga untuk menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang.

Lebih jauh pariwisata ini dalam arti sempit, hanya memanfaatkan waktu yang senggang, akan tetapi dalam arti luas, yaitu menyangkut berbagai macam motivasi perjalanan, yang akan membawa pengaruh terhadap segi-segi kehidupan perorangan maupun masyarakat. Direktorat Jenderal Pariwisata (1988:4) di Indonesia pariwisata telah berperan nyata dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, kesempatan kerja, penambahan devisa, keadaan sosial masyarakat makin baik dan kebudayaan bangsa makin memperkokoh apresiasi.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi daerah dari pusat kepada daerah suatu wilayah diharapkan dapat lebih menggali dan memanfaatkan potensi wilayahnya, sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang NO 32 Tahun 2004 “Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dikenal sebagai wilayah pertanian dan sebagai dari kesemuanya itu merupakan potensi wisata yang harus dikembangkan secara maksimal, disamping alamnya yang mempesona juga budaya yang khas sebagai adat Mandailingnya (Pahompu, 2010).

Salah satu potensi alam tersebut terdapat di Aek Sijorni Kecamatan Sayur Matinggi. Berada sekitar 30 km arah timur Kota Padangsidempua. Jarak yang demikian dapat diakses dengan alat transportasi berupa : becak motor, dan angkutan umum. Dimana tempat pariwisata ini sudah terkenal sejak puluhan tahun silam. Pariwisata Aek Sijorni sangat potensial dikembangkan hanya saja tempat ini kurang diperhatikan oleh pemerintah Tapanuli Selatan. Padahal, jika didukung dengan perhatian yang serius dari pemerintah dengan kebijakan kepala daerah, pariwisata Aek Sijorni ini bukan tidak mungkin akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (northsumatera tourism,2009).

Selama ini kebijakan-kebijakan pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan tidak difokuskan dengan serius pada sektor pariwisata demikian pula halnya pada pariwisata Aek Sijorni ini. Hal ini dibuktikan dengan minimnya anggaran yang dikucurkan untuk bidang pariwisata dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya jika dibandingkan dengan anggaran yang dikucurkan terhadap sektor lain. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Tapanuli Selatan bapak Drs. Madalun Harahap mengatakan pada tahun 2009 anggaran untuk pariwisata berkisar 0,7%, tahun 2010 0,8% dan tahun 2011 0,8% jadi rata-rata tiap tahunnya untuk sektor

pariwisata hanya berkisar 0,8% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, sektor ini seperti berjalan di tempat, tanpa memberikan kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal sektor pariwisata di daerah Tapanuli Selatan cukup menjanjikan jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tentunya dengan pengelolaan dan pengembangan yang baik maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat juga.

Selain ada beberapa kendala yang dirasakan berupa sarana dan prasarana yang masih belum memadai, seperti jalan dan jembatan yang memerlukan perbaikan, agar akses transportasi ke objek wisata Aek Sijorni berjalan dengan lancar begitu juga dengan pembangunan, perbaikan dan pembenahan mushola, toilet, tempat ganti baju, tempat makan, area parkir serta sarana penunjang lainnya. Hal tersebut sangat diperlukan dan pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan, sehingga kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi.

Bertitik tolak dari hal yang diuraikan di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Peranan Pemerintah Tapanuli Selatan Dalam Pengelolaan Pariwisata Aek Sijorni”.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya peranan Pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni

- b. Minimnya anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya dalam pengelolaan pariwisata
- c. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni
- d. Belum maksimalnya prasarana dan sarana yang disediakan untuk menunjang objek wisata Aek Sijorni.
- e. Belum adanya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam mengelola pariwisata Aek Sijorni.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini terbatas pada peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni“.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka perumusan penelitian masalah adalah :

- a. Bagaimana peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni?
- b. Kendala-kendala apa yang di hadapi pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengeloaan pariwisata Aek Sijorni?
- c. Apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Tapanuli Selatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni?

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian sangat penting peranannya dalam memadukan dan mengarahkan jalannya penelitian, sehingga peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data yang tidak perlu dianalisis. Maka penelitian ini difokuskan pada peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni
2. Mengetahui kendala-kendala yang di hadapi pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Tapanuli Selatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam tentang peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bagi masyarakat sekitar Aek Libung dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata Aek Sijorni.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah Tapanuli Selatan untuk lebih mengelola dan memperkenalkan tempat wisata Aek Sijorni bagi masyarakat luas.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

Cooper dan Schindler dalam Sugiyono (2008:41) kajian teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Sementara itu Hoy dan Miskel dalam Sugiyono (2008:43) mengatakan, teori berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. Dari pendapat di atas ditarik kesimpulan kajian teoritis adalah seperangkat definisi yang tersusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengetahuan. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan dan sebagai panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit memiliki kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Inu Kencana (2005:20) pemerintahan memiliki pengertian luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas merupakan pemerintah yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan

lembaga yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus roda pemerintahan

Sementara itu menurut Bayu Surianingrat dalam Faried Ali (1997:11), pemerintah atau pemerintahan berasal dari suku kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Didalam kata tersebut terkandung adanya empat unsur yang membedakan dengan kata lain yang mengandung kesamaan kata seperti kata “*to order*” atau “*to command*”. Empat unsur yang menandai pengertian perintah adalah:

1. Adanya “keharusan” menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak yaitu yang member dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang member dan yang menerima perintah.
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Menurut C.F. Strong dalam Inu Kencana (2006:135) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan

kepentingan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Sementara itu menurut Wilson dalam Inu Kencana (2005:23) pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kekuatan tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata akan tetapi dua atau sekelompok orang dan sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Taliziduhu (1988:6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok, gejala ini terdapat suatu saat di dalam suatu masyarakat. Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, pemerintahan adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yang memerintah, yang termasuk kedalam badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Di Indonesia terbagi atas daerah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam Taliziduhu (1988:59) pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta pembantu-pembantunya. Istilah pemerintah pusat digunakan dalam

hubungannya dengan pemerintahan lain yang menjadi bagian integral dari Pemerintahan Nasional, dalam rangka negar kesatuan, pemerintah pusat adalah puncak hirarki pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Selain itu pemerintah pusat juga mengatur kehidupan bernegara, berbangsa secara keseluruhan termasuk :

1. Mengatur tata cara pelaksanaan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah
2. Mengatur hubungan internasional dan
3. Mengatur keberlangsungan hidup negara seperti perekonomian negara, pertahanan negara, penegakan hukum dan keadilan dan lain-lain.

Dalam mewujudkan keikutsertaan rakyat dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan, pemerintah pusat menyerahkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah secara desentralisasi teritorial kepada badan-badan pemerintahan yang dibentuk di daerah. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan diatur dalam Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. (Riwu Kaho, 1990:161).

Untuk mengembangkan potensi daerah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola daerahnya sendiri. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (Irawanan Soejito. 1997:63)

1. Sistem Pemerintahan Daerah

Dalam Taliziduhu (1988:71) pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang dijalankan menurut hubungan pemerintahan yang dibuat atau diciptakan dengan menggunakan teknik desentralisasi. Pemerintahan Daerah menyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam melaksanakan pemerintahan di daerah atau diwilayahnya berdasarkan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, potensi daerah dan kondisi ekonomi daerah masing-masing berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam Undang-undang NO 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyatakan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu dalam Undang-undang NO 22 Tahun 1999 menyatakan secara eksplisit bahwa prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah didasarkan pada pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah sesuai dengan prinsi-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta keanekaragaman potensi dan daerah. (Effendi 2005:57)

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah mempunyai kewajiban mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di daerah agar tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Diantara tugas pemerintah atau aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. (Sudirwo 1991:28)

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah

dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Agar pelaksanaan otonomi berjalan lancar, maka pemerintah menetapkan hak dan kewajiban bagi daerah saat melaksanakan otonomi. Dalam Undang-undang NO 32 Tahun 2004 pasal 21 menyatakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak :

- 1). Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- 2). Memilih pimpinan daerah
- 3). Mengelola aparatur daerah
- 4). Mengelola kekayaan daerah
- 5). Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- 6). Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- 7). Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
- 8). Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu yang menjadi kewajiban daerah dalam Undang-undang NO 32 Tahun 2004 pasal 22 meliputi:

- 1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi

- 4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- 6) Menyediakan pelayanan fasilitas kesehatan
- 7) Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan fasilitas umum yang layak
- 8) Mengembangkan jaminan fasilitas nasional
- 9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- 10) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- 11) Melestarikan lingkungan hidup
- 12) Mengelola administrasi kependudukan
- 13) Melestarikan nilai sosial budaya
- 14) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- 15) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah di atas dirumuskan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Selain hak dan kewajiban pemerintah daerah juga memiliki kewenangan. Dalam Undang-undang NO 32 Tahun 2004 pasal 14 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang NO 32 Tahun 2004 “Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Sementara itu dalam pengelolaan potensi yang dimiliki daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mengelola potensi tersebut sesuai dengan Undang-undang NO 32 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan
 - c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal menggali dan mengelola potensi suatu daerah.

2. Pariwisata

Kepariwisata dalam dunia modern pada hakikatnya ialah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hiburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat daerah lain atau negara lain. Menurut Kurt Morgenroth dalam Bakaruddin (2008:16).

“Kepariwisata dalam arti sempit ialah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat tinggal untuk sementara waktu, untuk berpesiar ditempat lain semata-mata sebagai konsumen dari sebuah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari diri pribadinya”.

Sementara itu menurut W. Hunziker dan K.Krapt dalam Bakaruddin (2008:15).

“Tourism is the sum of the phenomena and relationship arising from the travel and stay of non residents, in so far as they any earning activity”.
 Dari rumusan ini mengandung dua unsur pokok yaitu : Pertama, pariwisata adalah suatu bentuk interaksi sosial yang ditimbulkan oleh kunjungan orang-orang asing atau lokal dan bukan penduduk setempat. Kedua, kedatangan orang asing itu tidak dengan tujuan untuk tinggal menetap di suatu tempat yang mereka kunjungi dan bukan pula untuk melakukan pekerjaan dengan mendapat penghasilan”.

Dalam Undang-undang NO 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) menyatakan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan pengertian pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok untuk sementara waktu, dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk mencari nafkah ditempat yang

dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Dalam Bakaruddin (2008:17) adapun dorongan atau kebutuhan untuk alasan untuk melakukan perjalanan itu adalah:

- 1) Melihat keindahan alam suatu daerah yang barangkali tidak terdapat di daerahnya.
- 2) Mengetahui adat-istiadat dan tata cara hidup yang khas dari suatu daerah yang mungkin berbeda dengan daerah asalnya.
- 3) Mendapatkan informasi atau pengalaman baru selama diperjalanan dan daerah yang dikunjungi.
- 4) Keinginan berlibur dan beristirahat setelah bekerja keras secara kontiniu, agar kesegaran jasmani dan rohani dapat di pulihkan kembali.

Munculnya macam-macam kebutuhan dan dorongan untuk melakukan perjalanan pariwisata untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam melakukan perjalanan pariwisata, wisatawan tidak hanya sekedar melihat keindahan suatu tempat pariwisata akan tetapi juga melihat keramah tamahan penduduk, kebersihan, keamanan yaitu yang diwujudkan dalam sapta pesona wisata.

a. Sapta Pesona Pariwisata

Sapta Pesona merupakan kebijakan dalam dunia pariwisata tanah air. Melalui Sapta Pesona, diharapkan terwujudnya suasana kebersamaan semua pihak untuk terciptanya lingkungan alam dan budaya budaya luhur bangsa. Sapta Pesona merupakan jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk

menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam Sapta Pesona tersebut. Tujuan diselenggarakan program Sapta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari (Alfa Hidayat, 2010)

Sapta Pesona merupakan jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam Sapta Pesona tersebut (Ari Saksono, 2008)

Sapta pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung kesuatu daerah. Dengan kondisi dan situasi yang menarik dan nyaman, wisatawan akan betah tinggal lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan indah dalam hidupnya. Sapta pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan (Yulia Rahadiva, 2009:14-18).

1). Keamanan

Wisatawan akan senang berkunjung kesuatu tempat apabila merasa aman, tentram, tidak takut, terlindungi dan bebas dari :

- a) Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, penipuan dan lain sebagainya.
- b) Terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya.
- c) Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan rekreasi atau olah raga.
- d) Gangguan dari masyarakat, antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan untuk membeli dagangannya, tangan jahil, ucapan dan tindakan lain yang tidak bersahabat dan sebagainya.

Jadi, aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik milik (barang) wisatawan.

2). Ketertiban

Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang termasuk wisatawan, kondisi tersebut tercermin dari suasana yang teratur, rapi dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua kegiatan kehidupan masyarakat seperti:

- a) Lalu lintas tertib, teratur, dan lancar, alat angkutan yang datang dan berangkat tepat pada waktunya.
- b) Tidak nampak orang berdesakan atau berebutan untuk mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan.
- c) Bangunan dan lingkungan ditata dengan rapi.
- d) Pelayanan dilakukan secara baik dan tepat.
- e) Informasi yang tepat dan tidak membingungkan.

3). Kebersihan

Bersih merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan yang menampakkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman berada ditempat dan bersih seperti:

- a) Lingkungan yang bersih maupun ditempat-tempat umum seperti: restoran, hotel, angkutan umum, tempat rekreasi, mushola, toilet bersih dari sampah dan kotoran, corat-coret dan lain sebagainya.
- b) Sajian makanan dan minuman bersih dan sehat.
- c) Penggunaan dan penyajian alat perlengkapan yang bersih seperti sendok, piring, tempat tidur, alat olah raga dan lain sebagainya.
- d) Pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi, dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap dan lainnya.

4). Kesejukan

Lingkuangan yang hijau, segar, rapi, suasana atau keadaan sejuk, nyaman dan tentram. Kesejukan yang dikehendaki tidak saja harus berada diluar ruangan atau bangunan, akan tetapu juga di dalam ruangan, misalnya ruangan kerja atau belajar, ruangan makan dan lain sebagainya, untuk itu hendaklah kita :

- a) Turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat maupun pemerintah.

- b) Berperan secara aktif untuk menganjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan pemeliharaan kebersihan.
- c) Membentuk perkumpulan yang tujuannya memelihara kelestarian lingkungan.
- d) Memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup menjadi sejuk bersih, segar dan nyaman.

5). Keindahan

Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberikan kesan yang enak dan cantik dilihat.

Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib serta tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia, karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia.

6). Keramah tamahan

Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati. Ramah tamah tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian ataupun tidak tegas dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikap. Ramah merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada

umumnya yang selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya tarik bagi wisatawan, oleh karena itu harus dipelihara terus menerus.

7). Kenangan

Kenangan adalah kesan yang melekat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata. Kenangan yang indah ini dapat dengan cara:

- a) Akomodasi yang nyaman, bersih, dan sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, suasana yang mencerminkan ciri khas daerah dalam bentuk gaya bangunan serta dekorasinya.
- b) Atraksi seni budaya daerah yang khas dan memesona baik itu berupa seni tari, seni suara dan berbagai macam upacara.
- c) Makanan dan minuman khas daerah yang lezat, dengan penampilan dan penyajian yang menarik. Makanan dan minuman ini merupakan salah satu daya tarik yang kuat dan dapat dijadikan jati diri (identitas daerah).
- d) Cendramata yang mencerminkan ciri khas bermutu tinggi, mudah dibawa dan harga yang terjangkau mempunyai arti sendiri dan dapat dijadikan bukti kenangan dari kunjungan seseorang kesuatu tempat atau daerah atau negara.

Supaya cendramata lebih berkesan, maka cendaramata tersebut mempunyai syarat, antara lain: tidak cepat rusak, sedapat mungkin selalu nampak didepan wisatawan, memiliki hubungan yang substansial dengan objek wisata yang bersangkutan, dapat berupa foto dari objek, miniatur dan laian-lain.

Dalam pengelolaan pariwisata selain sapta pesona wisata yang perlu diperhatikan dan dijaga, ada juga faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu prasarana dan sarana wisata. Ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata akan semakin menunjang peningkatan kualitas sebuah obyek wisata.

b. Prasarana dan Sarana Pariwisata

1). Prasarana Pariwisata

Prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Oka A Yoeti (1996:178) menjelaskan bahwa prasarana pariwisata ada tiga bagian yaitu:

- a) Prasarana umum yaitu menyangkut hubungan orang banyak, yang tujuannya adalah untuk membantu kelancaran roda pembangunan.
- b) Kebutuhan masyarakat banyak seperti rumah sakit, kantor pos, perbankan, polisi dan sebagainya.

c) Prasarana kepariwisataan diantaranya :

1. *Receptive Tourist Plant*, segala bentuk organisasi yang mengurus dan mempersiapkan kedatangan pariwisata.
2. *Resident Tourist Plant*, semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata.
3. *Reactive and Spotive Plant*, yaitu semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga.

Prasarana dan sarana pariwisata sesungguhnya merupakan “*Tourist Suplay*” yang perlu disiapkan atau disediakan bila hendak mengembangkan industri pariwisata.

2). Sarana Pariwisata

Sarana kepariwisataan adalah semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan. Tentang “sarana” pariwisata menurut Lathar A.

Kreck dalam Yoeti (1996:184) dijelaskan pengertian sarana:

“Yang dimaksud dengan sarana adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan.

Tiga bagian yang penting sarana kepariwisataan yaitu :

- a) Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung kepada arus kedatangan orang yang

melakukan perjalanan wisata, hotel, bar dan restoran serta rumah makan lainnya, objek wisata dan atraksi wisata.

- b) Sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk rekreasi, fungsinya adalah untuk membuat para wisatawan dapat lebih lama tinggal pada daerah tujuan wisata.
- c) Sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok dan sarana yang berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisatawan lebih banyak mengeluarkan dan membelajakan uang ditempat yang dikunjunginya.

Prasarana dan sarana yang mendukung dan memadai akan semakin meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu obyek wisata. Keberadaan prasana dan sarana pariwisata yang baik akan meninggalkan kesan yang baik pula dalam diri wisatawan begitu pula halnya dengan keamanan dan kenyamanan pariwisata, jika wisatawan merasa aman dan nyaman maka wisatawan akan berkunjung untuk kedua kali dan seterusnya.

c. Keamanan dan Kenyamanan Pariwisata

Keamanan adalah suatu hasrat untuk memperoleh ketenangan dan perasaan aman. Kondisi Keamanan merupakan faktor yang sangat penting dan sangat diperlukan sebelum wisatawan menuju tempat wisata yang hendak dikunjungi. Rasa aman merupakan terjamin keselamatan jiwa dan fisik termasuk milik (barang) wisatawan. Pada berbagai tempat pariwisata

faktor keamanan kadang masih kurang. Ini dibuktikan dengan adanya perlakuan dari masyarakat yang kurang baik.

Faktor keamanan sangat menentukan di dalam pariwisata karena tanpa ada perasaan aman dari wisatawan yang berkunjung ke daerah tempat pariwisata otomatis wisatawan tidak akan mau berkunjung untuk yang kedua kalinya. Keamanan merupakan perasaan yang dirasakan seseorang bebas dari masalah-masalah seperti kriminalitas, pemerasan, kejahatan, serta tindakan yang mengganggu keselamatan seseorang (Masfebri Alfitra, 2003:13).

Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata keamanan dan kenyamanan wisata harus diperhatikan karena sekali wisatawan merasa tidak aman pada suatu objek wisata maka untuk waktu yang selanjutnya wisatawan tersebut tidak akan berkunjung lagi ke tempat wisata tersebut. Ini membuktikan faktor keamanan dan kenyamanan pariwisata sangat diperlukan dan tentunya harus diperhatikan. Untuk lebih meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke suatu tempat wisata diperlukan adanya promosi. Melalui promosi wisatawan akan mengetahui keberadaan dan keindahan yang ditawarkan suatu tempat wisata.

d. Promosi dalam Bidang Pariwisata

Supaya suatu tempat wisata dikenal oleh masyarakat luar perlu diadakan promosi, dengan adanya promosi yang baik akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan. Kegiatan promosi merupakan suatu kegiatan yang intensif dalam waktu yang relatif singkat, dalam kegiatan

promosi diadakan usaha untuk memperbesar daya tarik produk terhadap calon konsumen. Soekadijo dalam Bakaruddin (2008:55-56) ada dua macam promosi dalam bidang pariwisata yaitu :

1) Promosi Langsung (*consumer promotion*)

Sasaran terakhir dari semua kegiatan pemasaran dan promosi adalah orang-orang yang akhirnya mengeluarkan uang untuk mengadakan perjalanan wisata. Berhasil tidaknya promosi kepariwisataan akan terlihat dari banyaknya jumlah orang yang membeli produk pariwisata yang dipromosikan. Untuk tujuan tersebut, makin besar daya tarik produk pariwisata makin baik untuk keperluan itu pada waktu-waktu tertentu yang tepat diadakan promosi. Cara-cara yang lazim digunakan untuk keperluan promosi adalah sebagai berikut :

- a) Peragaan (*display*), misalnya rumah adat, pakaian tradisional, gambar-gambar. Dengan peragaan itu produk dan tempat penjualannya lebih mudah dapat dikenal oleh calon konsumen atau wisatawan.
- b) Barang cetakan (*prospectus, leaflet, folder, booklet atau brochure*) yang disebarkan kepasar, berbagai informasi dan imbauan dapat dicantumkan didalamnya.
- c) Pameran khusus berupa benda-benda kebudayaan, pertunjukan kesenian dan sebagainya yang ditingkatkan menjadi “pekan atau bulan pariwisata” yang dapat diadakan di daerah tujuan wisata.

- d) Pemberian hadiah khusus selama waktu promosi kepada konsumen atau wisatawan.

2) Promosi Tidak Langsung (*deacer promotion*)

Promosi tidak langsung pertama-tama ditujukan kepada penyalur produk wisata, seperti biro perjalanan umum dan cabang-cabangnya, agen perjalanan, organisasi perjalanan dan sebagainya. Tujuan promosi tidak langsung ini adalah untuk:

- a) Menarik perhatian mereka kepada komponen-komponen produk pariwisata yang ditawarkan dan membuat mereka bersedia untuk menjualkannya dalam produk pariwisata yang mereka susun.
- b) Menciptakan kondisi dan menyediakan sarana sarana untuk menyusun produk pariwisata yang tepat untuk dijual kepada konsumen atau wisatawan.

Cara-cara yang banyak dilakukan untuk keperluan promosi tidak langsung ini antara lain:

1. Pemberian informasi dalam bentuk barang cetakan.
2. Publikasi dalam majalah-majalah yang beredar didaerah perusahaan penyalur.
3. Kunjungan kepada perusahaan-perusahaan penyalur.
4. Pertemuan-pertemuan dengan perusahaan penyalur untuk mengunjungi daerah wisata.

5. Menyelenggarakan temu karya (*workshop*).
6. Mengundang wakil-wakil perusahaan penyalur untuk mengunjungi daerah wisata.

Promosi dengan cara-cara semacam itu cocok dilakukan terhadap orang-orang yang berpengaruh atas pengambilan keputusan oleh wisatawan potensial mengadakan perjalanan wisata. Berhasil tidaknya promosi dapat dilihat dari banyaknya informan yang diminta dan besarnya volume kedatangan wisatawan.

3. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata

Pada dasarnya terdapat banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk di kelola dalam rangka kepariwisataan serta memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas dunia. Kekayaan alam berbasis bahari merupakan potensi yang tinggi untuk dikelola dan dikembangkan tanpa menghilangkan potensi yang ada di daratan seperti danau, air panas dan sungai.

Perubahan struktur otoritas negara dalam pengelolaan pariwisata serta adanya atonomi daerah mengharuskan daerah untuk melakukan reorientasi dan rekonfigurasi, peraturan dan organisasi pengelolaan termasuk perubahan perilaku birokrasi, peraturan dan organisasi pengelolaan secara lebih nalar dan organisasi pengelolaan termasuk perubahan perilaku birokrasi, peraturan dan organisasi pengelolaan. pengelolaan pariwisata harus mampu memberikan manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat di tanah

air (*Equality*) dan berpartisipasi serta bersaing bebas sesuai dengan strata kemampuan yang dimiliki basis awal sumberdaya pariwisata merupakan ketersediaan barang publik (*Open Access*), sehingga pemanfaatan terhadap sumberdaya ini harus lebih inklusif. Tindakan kepentingan pemberdayaan sumber daya pariwisata melalui koordinasi antar instansi atau dinas atau antar departemen dan swasta berderajat tinggi harus berjalan secara tepat, efisien dan sinergis. (Bakaruddin, 2008:103).

Dalam menghadapi berbagai masalah kepariwisataan diperlukan visi dan misi yang tepat dan terarah. Peranan pemerintah daerah untuk mengatur mekanisme kepariwisataan melalui penetapan kebijakan dan arah strategi yang tepat. Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program otonomi daerah dapat menghindari *market failure* terhadap pemasaran produk kepariwisataan.

Desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk melakukan perencanaan kepariwisataan akan dapat menciptakan kemampuan lokal dan tampil produk-produk yang bercirikan daerah (*customize product*). Dengan demikian kepariwisataan daerah dapat tumbuh dan berjalan secara alamiah. (Bakaruddin, 2008:104).

Adapun peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tempat pariwisata yaitu :

- a. Mengadakan kerja sama yang baik melalui dinas terkait maupun dengan pihak ketiga (*investor dan event organizer*) untuk mengadakan atraksi-atraksi atau even-even wisata.

- b. Menetapkan berbagai peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu perlu diambil tindakan yang tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
- c. Menggugah masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi.
- d. Menentukan daerah tujuan utama pariwisata yang memiliki keunikan dibanding dengan daerah tujuan wisata lain, terutama yang bersifat tradisional dan alami.
- e. Mengikutsertakan pegawai atau staf pada berbagai diklat maupun kursus-kursus atau penataran atau seminar dalam bidang pariwisata.
- f. Mengadakan penyuluhan atau pembinaan bidang pariwisata kepada masyarakat dan pengusaha jasa pariwisata.
- g. Peningkatan sistem promosi yang tepat dan efektif.
- h. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengadaan dan perbaikan jalan, telephone, angkutan, pusat perbelanjaan wisata dan fasilitas lain disekitar lokasi daerah tujuan wisata sangat diperlukan.

- i. Pengelolaan pariwisata yang diorientasikan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan (savalaketoba, 2010)

Sementara itu dalam Undang-undang NO 10 Tahun 2009 pasal 30 mengatur tentang pariwisata menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- b. Menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.
- c. Menetapkan daya tarik wisata Kabupaten/Kota.
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota.
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya: dan
- j. Mengalokasikan anggaran.

Di dalam pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang

optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengelolaan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengelolaan pariwisata.

Pengelolaan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari bagian pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga *stake holder* kunci yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengelolaan dan pembangunan sektor pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, pendapatan *income* perkapita, dan peningkatan devisa negara.

Peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infra struktur tidak hanya dalam bentuk fisik memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan umum keluar negeri, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata. Maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infra struktur dan sarana pariwisata.

4. Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Pariwisata

Dalam pengelolaan pariwisata tentu ada kendala-kendala yang dihadapi, dalam (Goegle,2010) kendala-kendala dalam pengelolaan pariwisata meliputi :

a. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang berasal dalam yang mengakibatkan suatu objek wisata tidak berkembang, adapun kendala internal dalam pengelolaan pariwisata meliputi:

- 1) Kurangnya modal dan rendahnya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang pariwisata merupakan kendala yang seringkali muncul.
- 2) Prasarana dan sarana yang kurang memadai untuk mendukung kepariwisataan
- 3) Kurangnya promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang pariwisata
- 4) Keterbatasan tenaga terampil yang professional di bidang pariwisata seni dan budaya.
- 5) Kurangnya pendidikan dan pelatihan tekhnis aparatur dinas kebudayaan dan pariwisata.
- 6) Rendahnya mutu pelayanan dari para penyelenggara pariwisata, persaingan yang tidak sehat di antara para penyelenggara pariwisata serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya perlindungan konsumen yang sangat ditekankan.

- 7) Kekhasan dan keunikan atraksi dan aktifitas wisata yang ditawarkan masih belum menjadi suatu daya tarik bagi kedatangan wisatawan mancanegara, karena produk yang ditawarkan tidak dikemas dengan baik dan menarik seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain.
- 8) Pengelolaan pariwisata yang bersifat *top-down* merupakan salah satu kendala yang banyak menghambat pariwisata, banyak daerah tujuan wisata yang tidak dikembangkan karena berbagai keterbatasan dari pemerintah pusat, sementara itu pihak swasta dan pemerintah daerah harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar, kendala ini biasanya berasal dari masyarakat. Dalam (Goegle,2010) pengelolaan pariwisata kendala eksternal meliputi:

- 1) Sering timbulnya konflik dan kerusakan sosial serta situasi dan kondisi politik yang masih memanas, berakibat pada kurang terjaminnya keamanan bagi para wisatawan.
- 2) Status kepemilikan objek wisata yang beragam dan terorganisir.
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata. Banyak rencana pengembangan yang gagal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran tersebut.
- 4) Belum adanya organisasi pendukung bidang kepariwisataan. Melihat kendala-kendala dalam pengelolaan pariwisata di atas sudah seharusnya

pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut karena bukan tidak mungkin kendala-kendala yang ada akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik dalam bidang pariwisata dan tentunya akan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya.

5. Upaya-upaya dalam pengelolaan pariwisata

Untuk menunjang sektor pariwisata menjadi sektor andalan diperlukan upaya-upaya yang mendukung pengelolaannya. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kunjungan wisatawan sebanyak mungkin. Dalam Bakaruddin (2008:112) upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata meliputi:

- a. Meningkatkan pemanfaatan potensi objek wisata
- b. Peningkatan fasilitas, yang mencakup kualitas dan kuantitas di sektor pelayanan umum dan kepariwisataan.
- c. Menyediakan dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang aktual dan akurat sehingga dapat menunjang program pemasaran dan promosi.
- d. Melakukan peningkatan program kemitraan dan promosi antara pelaku (*stakeholders*) kepariwisataan seperti hubungan profesional antara swasta dan pemerintah
- e. Penetapan kelembangan/dinas teknis kepariwisataan dan yang terkait untuk mencapai kedekatan visi dan persepsi dalam memandang sector

kepariwisataan sebagai sektor unggulan yang wajib didukung oleh sektor-sektor lain.

- f. Peningkatan sumber daya manusia melalui proses pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, bagi tenaga kerja tampil maupun unsure pimpinan jajaran kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan.
- g. Peningkatan sadar wisata melalui aplikasi “sapta pesona” baik kepada masyarakat, swasta maupun aparat pemerintah melalui kampanye dan penyuluhan.
- h. Menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan kepariwisataan.

Dengan upaya yang telah disusun diatas, dalam pelaksanaanya perlu diperhatikan dan diterapkan serta ditegaskan bahwa dalam implementasi upaya-upaya tersebut diperlukan kerja sama antara seluruh pihak untuk mendukung pengelolaan pariwisata.

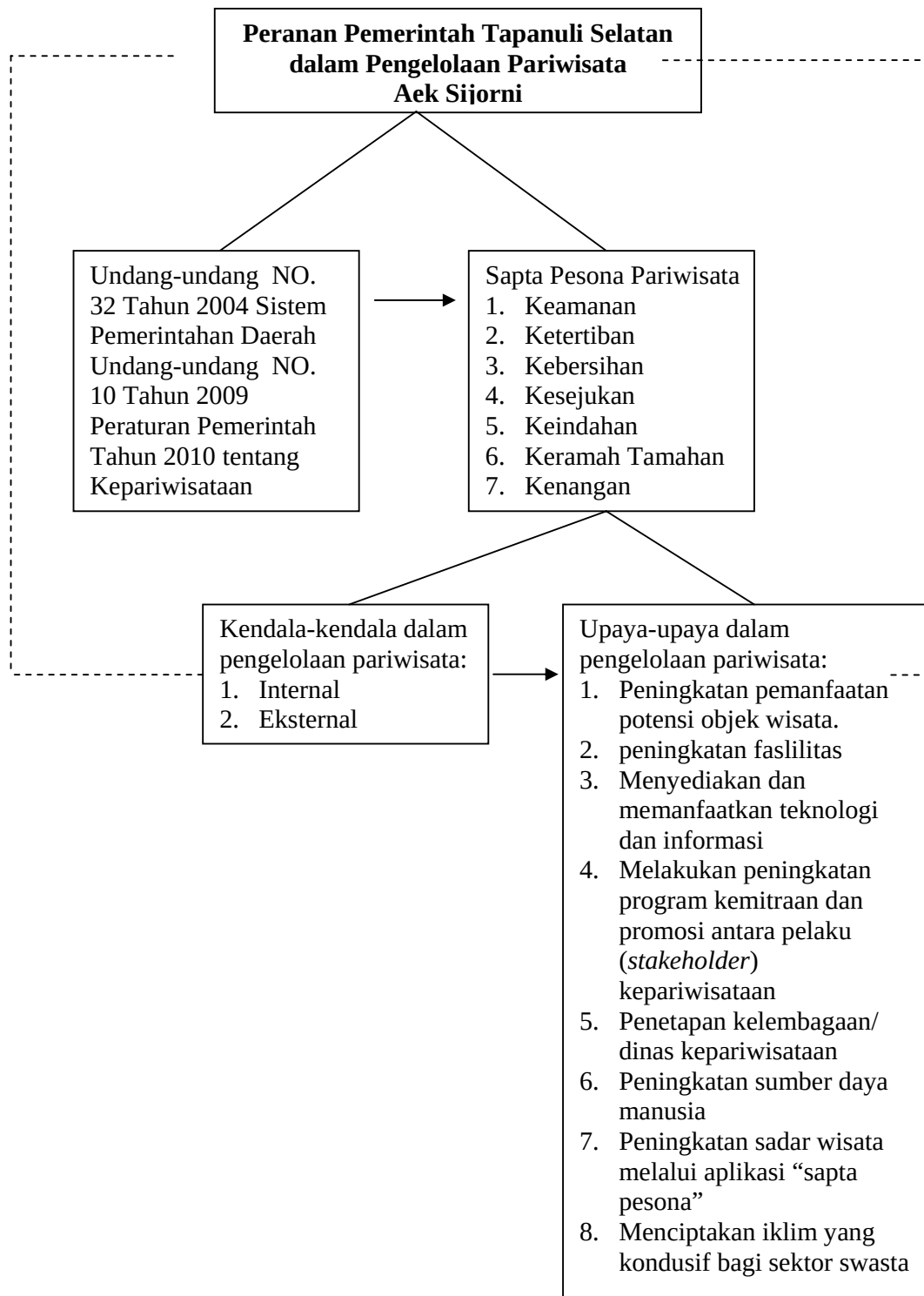
B. Kerangka Konseptual

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan, dan dalam pengelolaannya dibutuhkan peranan dari pemerintah dalam pengelolaannya. Objek wisata Aek Sijorni merupakan suatu daerah tujuan wisata yang potensial, air yang jernih dan pemandangan alam yang asri serta banyaknya pohon hijau yang tumbuh dikawasan tersebut merupakan sebagian alasan daerah ini layak untuk dikembangkan. Keterlibatan dan

peranan pemerintah dalam mengelola pariwisata sangat menentukan peluang kemajuan industri pariwisata tersebut.

Peranan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata sangat diperlukan. Dalam penelitian ini membahas tentang pariwisata Aek Sijorni yang berada di kelurahan Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Pariwisata Aek Sijorni ini layak untuk dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah karena memiliki keindahan alam dan panorama yang masih asri. Dalam pengelolaan pariwisata tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi begitu juga dengan pengelolaan pariwisata Aek Sijorni yang meliputi kendala internal dan kendala eksternal, untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut pemerintah juga tentunya mempunyai upaya-upaya untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut yang terdiri dari penyediaan sarana dan prasarana pariwisata dan promosi pariwisata.

Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan kedepannya pariwisata Aek Sijorni dapat dikelola lebih baik lagi. Setelah dilakukan penelitian diharapkan dapat mengetahui peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni.



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah, maka kabupaten Tapanuli Selatan diharuskan untuk menggali potensi daerah. Sebagai salah satu aset daerah yang potensial dibidang pariwisata daerah adalah Aek Sijornu. Dari penelitian yang dilakukan ditarik kesimpulan:

- 1 Peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni belum maksimal, peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni baru berupa: (1). Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan prasarana dan sarana pariwisata Aek Sijorni, (2). Melakukan promosi pariwisata, (3). Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan pariwisata Aek Sijorni, (4). Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata, (5). Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata. Peranan pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dan pengelolaan pariwisata Aek Sijorni.

2 Dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni pemerintah Tapanuli Selatan menemui beberapa kendala yaitu:

a. Kendala Internal

- 1) Minimnya anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Tapanuli Selatan khususnya dalam pengembangan objek pariwisata yaitu hanya berkisar 0,8% tiap tahunnya.
- 2) Keterbatasan tenaga terampil yang professional dibidang pariwisata, yang memahami tentang pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah tidak ada karena tidak seorangpun yang latar belakang pendidikannya berasal dari kepariwisataan.
- 3) Kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengakibatkan kurangnya pemahaman aparatur tentang pariwisata.
- 4) Prasarana dan sarana yang kurang memadai untuk mendukung pengelolaan pariwisata Aek Sijorni, prasarana dan sarana yang ada di Aek Sijorni perlu dilakukan pembangunan, perbaikan dan pembenahan lagi untuk menunjang objek wisata ini.
- 5) Kurangnya promosi yang dilakukan pemerintah Tapanuli Selatan, sehingga pariwisata Aek Sijorni kurang dikenal dan diketahui masyarakat luar.

b. Kendala Eksternal

- 1) Status kepemilikan lahan yang sebagian masih dimiliki oleh masyarakat sekitar, akibatnya pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengelola objek wisata Aek Sijorni dan perkembangan pariwisata semakin lambat.
 - 2) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sadar wisata dan sapta pesona masih kurang, pemahaman masyarakat akan sapta pesona kurang ini dibuktikan dengan kebersihan, keramah tamahan, cendra mata masih kurang diperhatikan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni meliputi:
- a. Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata, seperti pembangunan jembatan, mushola, toilet, tempat makan pengunjung, tempat parkir, dan tempat istirahat pengunjung.
 - b. Melakukan promosi pariwisata dengan cara memberikan brosur, buklet kepada masyarakat, pemberitahuan lewat media, yaitu media elektronik yaitu dengan menyiarkannya di radio yang ada di Tapanuli Selatan maupun non elektronik yaitu dengan memanfaatkan surat kabar yang ada di Tapanuli Selatan.
 - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata dengan cara melakukan pelatihan bagi anggota Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Tapanuli Selatan, memberikan

penyuluhan kepada masyarakat tentang pariwisata dan manfaatnya bagi masyarakat.

- d. Melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dengan cara bersama-sama mengelola, merawat dan menjaga pariwisata Aek Sijorni.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni pemerintah Tapanuli Selatan diharapkan dapat lebih memberikan perhatian pada sektor pariwisata Aek Sijorni, yaitu dengan penyediaan dana, prasarana dan sarana untuk lebih menunjang keberadaan pariwisata Aek Sijorni ini.
2. Pemerintah Tapanuli Selatan diharapkan memiliki upaya-upaya dalam pengelolaan pariwisata Aek Sijorni, sehingga kedepannya pengelolaan pariwisata Aek Sijorni lebih berkembang dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendatan masyarakat.
3. Pemerintah Tapanuli Selatan melakukan promosi dalam bidang pariwisata, sehingga masyarakat luar lebih mengenal potensi pariwisata Aek Sijorni.
4. Kepada semua pihak agar dapat bekerjasama untuk mendukung dan mengelola pariwisata Aek Sijorni.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari Buku

- Bakaruddin. 2008. *Perkembangan dan Permasalahan Keparisataan*. Padang. UNP Press
- Daeng Sudirwo. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung. Angkasa.
- Direktorat Jenderal Pariwisata. 1988. *Pariwisata Nusantara Indonesia*. Jakarta
- Fariied Ali. 1997. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Irawan Soejito. 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. Bina Aksara.
- Inu Kencana Syafiie. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Inu Kencana Syafiie. 2006. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Romaja Rosda Karya
- Oka A Yoeti. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung. Angkasa
- Riwu Kaho. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Yokyakarta. Rineka Cipta
- Samsuridjal. 1997. *Peluang di Bidang Pariwisata*. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya
- Suharsimi Arikunto. 1995. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Alfabet
- Syafnil Efendi. 2005. *Buku Ajar Sistem Pemerintahan Daerah*. Padang
- Taliziduhu Ndraha. 1981. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara